

## PELAKSANAAN MONITORING PENERANGAN JALAN UMUM OLEH UPTD OPERASIONAL PJU DI KOTA PADANG

Rozi Yuwandi Saputra<sup>1</sup>, Adil Mubarak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 14 Mei 2019

Direvisi: 16 Mei 2019

Diterbitkan: 17 Mei 2019

### KATA KUNCI

*Pelaksanaan Monitoring,  
Penerangan Jalan Umum, PJU  
Kota Padang.*

### KORESPONDEN

No. Telepon: +62 821 7442 6507

E-mail:

[yuwandrozi@gmail.com](mailto:yuwandrozi@gmail.com),

[adilmubarak08@yahoo.co.id](mailto:adilmubarak08@yahoo.co.id)

### A B S T R A K

*Banyaknyakendala yang ditemui terkait ketaatan prosedur kerja, jadwal pemeriksaan yang belum jelas, dan sistem pelaporan dan penjelasan laporan kegiatan menyebabkan perlunya mengetahui monitoring penerangan jalan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas PJU Kota Padang. Penelitian bertujuan untuk melihat pelaksanaan monitoring penerangan jalan umum, kendala, serta bagaimana langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan metode/teknik purposive sampling. Adapun jenis data ialah data primer dan data sekunder. Data ini dikumpulkan dengan melakukan kegiatan observasi, studi dokumentasi dan wawancara berpedoman dan catatan lapangan. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan monitoring penerangan jalan umum yang dilakukan oleh Instansi terkait di Kota Padang belum dapat dikatakan efektif hal dikarenakan masih banyaknya hambatan yang dihadapi dan belum dapat dipenuhi sesuai kriteria fungsi monitoring dan standar yang ditetapkan; (2) terdapatnya kendala dalam pelaksanaan monitoring penerangan jalan umum, yaitu ketaatan akan tugas yang ditentukan, pemeriksaan yang belum terjadwal, laporan akan hasil kegiatan yang terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana, penjelasan akan kesesuaian perencanaan kerja terhalang akan terbatasnya jumlah pegawai; (3) langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat prosedur pelaksanaan yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan berfungsi yaitu bergerak dibidang pelayanan publik, pengoptimalan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu ada susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk melayani masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat merupakan Kota besar yang telah berkembang pesat, baik dalam jumlah penduduk maupun perkembangan pembangunannya. Dilihat dari sektor Penerangan Jalan umum, tentu menjadi salah capaian sejauh mana Kota Padang mampu memberikan kenyamanan terhadap penduduk akan penerangan jalan, baik di jantung Kota maupun di pinggiran batas Kota itu sendiri. Efektifnya penerangan sepanjang jalan Kota adalah poin penting dari mampunya Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan kedua dari Perda Kota Padang nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Padang, pada ditetapkan kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang merupakan pelaksana bidang Pekerjaan Umum yang di pimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan otonomi daerah, salah satunya dalam bidang perawatan dan monitoring penerangan jalan umum melalui UPT Operasional Penerangan Jalan Umum.

Dimaksudkan juga dalam Perda kota Padang nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang bahwa UPTD adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan menjalankan tugas penunjang tertentu. Pada Pasal 4 juga ditulis bahwa UPTD didirikan demi melaksanakan sebagian kegiatan menunjang perangkat daerah induknya.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Instansi ini, baik dan jeleknya infrastruktur khususnya sektor penerangan jalan umum disuatu daerah khususnya di Kota Padang, merupakan tanggungjawab dari UPT Operasional Penerangan Jalan Umum. Tujuan pemberian tanggungjawab kepada UPT Operasional Penerangan Jalan Umum adalah guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. UPTD Operasional PJU tersebut mengelola penerangan jalan umum dari perencanaan, penambahan, perluasan, pemasangan jaringan, pemeliharaan, perbaikan, dan monitoringnya. Artinya UPTD ada keseharusan akan penerangan jalan umum.

Penerangan jalan umum sangat diperlukan, sebab direalisasikan penerangan jalan umum secara langsung dapat membantu aktivitas masyarakat di malam hari. Namun, tak dapat dipungkiri hingga saat ini kebutuhan akan penerangan jalan masih sangat tinggi. Melalui penerangan jalan umum diharapkan mampu menciptakan keamanan warga masyarakat dan juga keamanan bagi lingkungan sekitar. Penerangan jalan umum sendiri berperan sangat vital untuk menunjang tingkat kelengkapan kota. Namun besarnya kebutuhan akan sektor ini, juga menjadi tolak ukur baik dalam fungsi maupun monitoring instansi itu sendiri terkait dalam tugas pokoknya.

Melihat tupoksi yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Operasional PJU jika dihubungkan dengan teori (Siagian, 2003) tentang teknik pengawasan secara langsung yaitu UPT memiliki tugas dalam melaksanakan monitoring terhadap kelaikan fungsi penerangan jalan umum,

perbaikan/rehabilitas, pemeliharaan serta peningkatan batas acuan penerangan jalan umum. Sedangkan dilihat dari teknik pengawasan tidak langsung UPT memiliki fungsi mencatat, menyusun, membuat laporan serta evaluasi dari teknisi di lapangan.

Pemantauan atau monitoring yaitu kegiatan mengusahakan kegiatan yang di-*planning* dapat tercapai. Poin kendala akan monitoring penerangan jalan umum salah satunya, yaitu belum optimalnya koordinasi pihak Unit Pelaksana Teknis akan teknisi yang berada di lapangan dan pelaporan data yang didapat di lapangan yang belum jelas, bahkan yang terjadi dilapangan penerangan jalan umum sangat jauh dari karakteristik layak.

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tahun 2014, saat ini kinerja pelayanan PJU baru mencapai 57,55%, dan terdapat 26.618 lampu yang ditempatkan di sejumlah titik, angka kebutuhan lampu PJU di Kota Padang adalah sebanyak 60.000 titik. Namun yang terjadi di lapangan, sangat lemahnya monitoring terhadap penerangan jalan umum ini. Seperti halnya banyak lampu jalan belum hidup, tiang lampu yang mulai keropos, bohlam lampu jalan yang tidak terang, dan beberapa kendala lainnya. Tidak hanya itu, jika menjurus kepada hal yang lebih dalam, bahkan di Kota Padang sendiri dengan lemahnya penerangan di sudut-sudut jalan Kota, malah menjadi daerah rawan tindak kriminalitas.

Berdasarkan koran Haluan per tanggal 9 Maret 2015 disebutkan bahwa Pemerintah Kota Padang memang abai dan kurang memberikan perhatian terhadap pemeliharaan lampu penerangan umum. Melalui Unit Pelaksanaan Teknis Operasional PJU Kota Padang, yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, dari sarana dan prasarana pendukung operasional lampu jalan, Pemerintah Kota Padang juga terkesan tidak memperhatikan. Sampai sekarang hanya punya satu mobil crane tahun 80-an, mobil pickup tahun 90-an, dan tahun 2006, serta dua sepeda motor tahun 2000-an.

Dari observasi awal dan realita tersebut tampak bahwa keadaan penerangan jalan umum di Kota Padang tidak berfungsi dengan semestinya, dikarenakan di beberapa tempat masih ada lampu jalan berkedip, bohlam lampu yang pecah, tiang lampu yang sudah tidak layak.

Monitoring didefinisikan sebagai skema terpolo yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi berjalan mampu diimplementasikan, umumnya digunakan dalam antara kinerja dan target (Mercy, 2005).

Menurut Kawung (dalam jurnal administration publik UNSRAT volume 3 nomor 46 tahun 2017) monitoring yang merupakan bagian dari manajemen pelayanan publik harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian standar pelayanan adalah batas yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari instansi terpilih, dalam hal ini pemerintah kepada masyarakat untuk dapat ikut mewujudkan capaian berkualitas. Dan sebuah standar pelayanan perlu secara terus menerus dimonitoring untuk mencapai tujuan dari pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Menurut (Subarsono, 2005) Monitoring memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan awal sehingga resiko yang lebih minim.
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan.

Menurut (Fahmi, 2014), mengemukakan fungsi monitoring bahwa :

1. Ketaatan adalah monitoring yang menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua sadar dan tahu standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan adalah monitoring menetapkan apakah sumber daya dan layanan yang ditentukan bagi pihak tertentu telah dicapai mereka.
3. Laporan adalah membantu menghitung wujudan perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat dari implementasi akan periode tertentu.
4. Penjelasan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Menurut (Subarsono, 2005) Monitoring memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjaga poin kebijakan yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga menekan resiko yang berlebihan.
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Pada tahap penyusunan rencana monitoring, menurut Soekartawi (dalam Hardinas, 15-16:2011) harus mencakup berbagai hal, yaitu :

1. Tujuan monitoring, untuk menghimpun data atau informasi akan penyelenggaraan hasil program dikelola semestinya.
2. Sasaran atau aspek yang dimonitor.
3. Faktor pendukung serta hambatan program.
4. Pendekatan teknik dan instrumen monitoring.
5. Waktu dan jadwal kegiatan monitoring, serta biaya yang dibutuhkan.

Untuk pencapaian manajemen yang baik tentu ada kendala yang dihadapi, sebagaimana Teori kendala yang dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan dikenalkan dalam bukunya *The Goal*. Dapat diartikan bahwa TOC adalah suatu metode kearah berfokus pembatasan tertentu hingga mejadi sangat fokus tujuan.

Menurut Hansen dan Mowen (dalam Setyaningrum dan Hamidi, 2008:28) jenis kendala dapat dikelompokkan berdasarkan asalnya dan berdasarkan sifatnya.

1. Berdasarkan asalnya
  - a. Kendala internal (*internal constraint*) adalah pembatasan dalam perusahaan atau organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan. Kendala internal baiknya dimanfaatkan dilevel atas untuk meningkatkan *throughput* semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya.
  - b. faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi ataupun sebuah sistem.
2. Berdasarkan sifatnya
  - 1) Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah terdapatnya kendala pada sumber daya yang telah dimanfaatkan.
  - 2) Kendala kendur (*loose constraint*) adalah kendala sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan utuh.

Dalam menghadapi kendala dibutuhkan solusi. Dalam mengimplementasikan ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan *Theory of Constraint* memfokuskan pada perbaikan yang terus-menerus dengan mengelola kendala dalam suatu sistem. TOC dalam Gusnardi (2010:339) menyatakan terdapat lima langkah dalam penyelesaian kendala.

Langkah-langkah tersebut adalah :

- a. Mengidentifikasi kendala suatu sistem (*Identify the system's constraints*)  
Mengidentifikasi bagian sistem mana paling lemah kemudian melihat kelemahan nyata atau kebijakan
- b. Eksploitasi kendala sistem (*Exploit the system's constraints*).  
Menentukan cara menipiskan kelola dan memanfaatkan kendala dengan *cost* yang paling murah.
3. Mengelola aliran sepanjang kendala (*Subordinate Everything to the step 2 decision*).  
Setelah menentukan kendala dan diputuskan bagaimana menyadari kendala tersebut maka harus mengevaluasi apakah kendala tersebut masih menjadi kendala pada performansi sistem. Jika tidak maka menuju ke langkah lain, tetapi jika ya maka akan menuju ke tahapan keempat.
4. Menambah kapasitas pada kendala sistem (*Elevate the system's constraint*)  
Jikalau berhasil, maka langkah kedua dan ketiga disebut gagal menangani kendala. Tentunya harus ada perubahan dasar sistem, seperti reorganisasi, perbaikan uang pondasi, atau modifikasi substansi.
5. Menghentikan masalah, kembali ke langkah pertama (*Break constraint and go back to step 1*).  
Jika langkah ketiga dan keempat telah berhasil dilakukan maka akan mengulangi lagi dari langkah pertama. Proses ini akan berputar sebagai siklus. Tetap disadari bahwa suatu solusi dapat memicu konstrain baru yang perlu terlaksana.

Untuk mencapai tujuan dan melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dijumpai akan pelaksanaan kegiatan, maka pengawasan perlu melalui beberapa fase dalam pelaksanaannya. Menurut Manullang (2004:183) fase-fase yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan adalah:

1. Menetapkan alat ukur (*standard*)
2. Menetapkan penilaian (*evaluate*)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Menurut data dari Badan Standarisasi Nasional tentang Spesifikasi penerangan jalan di perkotaan, yaitu :

1. Bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan atau di tengah jalan (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan bawah tanah.
2. Suatu unit lengkap yang memiliki sumber cahaya, elemen optik, elemen elektrik dan struktur penopang serta pondasi tiang lampu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dihubungkan dengan metode deskriptif untuk mengetahui gambaran bagaimana pelaksanaan monitoring penerangan jalan umum oleh Instansi UPTD Operasional PJU. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk melakukan interaksi dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menginterpretasikan dengan bahasa peneliti tentang hasil yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai tanya jawab untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD, Subbag Tata Usaha, Tenaga Teknis dan Masyarakat Kota Padang. Dalam uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dengan teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Monitoring memiliki tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang penyelenggaraan program yang nanti hasilnya akan diserahkan ke pengelola untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan sebuah program, dan dengan menentukan sasaran melalui teknik monitoring. Berdasarkan temuan peneliti dapat bahwa, pelaksanaan monitoring dilakukan dengan dihimpunnya data atau informasi melalui bagian pengaduan atau pelaporan tenan PJU lalu, Subbag Tata Usaha membuat laporan pembagian tim yang nantinya akan bertugas melakukan pemantauan lapangan, dan seterusnya jika disesuaikan laporan nantinya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan perbaikan. Hasil dari telah dilaksanakannya perbaikan akan dibuat laporan tertulis yang nantinya dijadikan sebagai rekap laporan bulanan, biaya yang dikeluarkan untuk operasional seperti pergantian komponen-komponen akan ditulis sesuai dengan prosedur.

Suatu pelaksanaan kegiatan tentu tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang berdampak pada pembatasan sebuah kinerja khususnya pada pelaksanaan monitoring. Demikian dengan pelaksanaan monitoring PJU harusnya masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasi melalui pemantauan rutin maupun laporan melalui masyarakat. Untuk melihat pelaksanaan monitoring oleh Unit Pelaksana Teknis Operasional Penerangan Jalan Umum Kota Padang digunakan kriteria sebagai berikut :

### a. Ketaatan (*Compliance*)

Berdasarkan hasil penelitian, ketaatan atau kepatuhan merupakan dasar pada sebuah kegiatan pemantauan atau monitoring, karena untuk menentukan tingkat kepatuhan implemendor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan diiringan dengan keberhasilan pencapaian target kerja yang dilihat melalui Standar Operasional Prosedur.

Standar Operasional Prosedur monitoring yang telah ditetapkan oleh suatu Instansi, menurut (Fahmi, 2014), selaku pelaksana tugas didalamnya termasuk administrator, staf, dan semua yang terlibat memiliki peran penting akan keberhasilan pencapaian target kerja. Seharusnya target kerja yang tertulis dalam SOP benar-benar harus menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai skema kegiatan yang telah ditentukan selalu diluar target, pelaksanaan pemantauan yang terhambat karena data dari penerimaan pengaduan yang telat, berdampak pada persiapan seperti operasional, pemilihan material dan juga laporan hasil lapangan yang menjadi lama.

### b. Pemeriksaan (*Auditing*)

Dalam kriteria pemeriksaan, menurut (Subarsono, 2005), monitoring digunakan sebagai alat untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai kepada kelompok sasaran. Dan juga digunakan untuk menetapkan apakah sumber daya dan layanan untuk pihak tertentu telah dicapai.

Dalam hal pelaksanaan monitoring penerangan jalan umum tentu target yang dimaksudkan adalah respon cepat akan kelayakan fungsi PJU itu sendiri, baik dari pemeriksaan rutin yang dilakukan maupun tahapan pemeriksaan dari pelaporan masyarakat. Melihat skema pelaksanaan kegiatan, saat pemeriksaan dilakukan, pelaksanaan kontrol malam merupakan sebuah kebijakan yang bagus mengingat penerangan jalan umum lebih efektif kelayakannya dilihat pada malam hari.

c. Laporan (*Accounting*)

Laporan digunakan untuk menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan sesudah periode tertentu. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan publik secara langsung dijadikan acuan dalam tingkat keberhasilan suatu kebijakan, khususnya penerangan jalan umum.

Pengaduan masyarakat juga merupakan poin yang patut diperhitungkan karena dapat dijadikan perbandingan sejauh mana monitoring mencapai fungsinya. Artinya jika menurunnya jumlah pengaduan masyarakat akan laporan kerusakan juga menentukan keberhasilan monitoring rutin yang dilaksanakan.

d. Penjelasan (*Explanation*)

Kriteria penjelasan yang dimaksud yaitu, perencanaan yang dibuat apakah sesuai dengan pelaksanaannya, ini tentu menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

Monitoring yang dilakukan oleh UPT Operasional diterapkan menjadi 3 jenis monitoring, yaitu langsung, tidak langsung dan koordinasi pihak terkait, ini ditujukan dengan maksud agar standar kegiatan dapat dipantau melalui pembagian tersebut.

Monitoring langsung merupakan tugas wajib dari UPT terhadap pelaksana tugas pemantauan, kegiatan ini dilakukan oleh tim yang menggunakan kendaraan sepeda motor dengan pembagian wilayah yang ditentukan, pemantauan ini dilakukan sekaligus sebagai perbandingan dari pengaduan yang dilakukan masyarakat. Kegiatan lain yang menunjang kegiatan ini adalah kontrol malam, kegiatan yang fungsinya lebih kepada mengukur kelayakan tingkat cahaya pada sebuah lampu jalan.

Lain halnya dengan monitoring tidak langsung, ini benar-benar suatu jenis monitoring yang berdampak langsung terhadap tingkat keberhasilan akan kegiatan UPT operasional yang mengemban tugas ini. Masyarakat sebagai pengguna fasilitas lampu jalan, memberikan pengaduan sejauhmana lampu jalan apakah masih berfungsi dengan semestinya, artinya UPT operasional dalam pelaksanaan monitoring dapat dinilai tidak hanya dalam melakukan pemeriksaan pemantauan, lalu pelaporan terhadap hasil kinerja, namun opini masyarakat adalah sebagai tolak ukur.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan monitoring penerangan jalan umum yang dilakukan oleh UPT operasional belum dapat dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan masih belum dapat memenuhi kriteria dari fungsi monitoring, diantaranya dapat dilihat dari fungsi monitoring, Ketaatan atau kepatuhan akan standar operasional prosedur yang masih terbatas hanya untuk prosedur perbaikan, sehingga prosedur seperti penentuan waktu pemantauan, pembuatan laporan dan juga pembagian tim operasional tidak tertulis dengan jelas, Pemeriksaan, merupakan kegiatan inti dari tugas pokok UPT Operasional yang masih belum mencapai target, seperti penentuan waktu kerja yang pasti, Laporan, adalah kegiatan awal dan akhir dari tugas pokok UPT

Operasional, yaitu laporan penerimaan surat pengaduan yang diteruskan pada tindak lanjut pemantauan, dan laporan pada hasil baik itu pemantauan, perbaikan atau sekedar perawatan lampu jalan, masih belum mencapai target, Penjelasan, adalah kesesuaian perencanaan kerja dengan pelaksanaannya, monitoring yang dilakukan oleh UPT Operasional yang mengemban tugas Dinas PUPR dalam penerangan jalan umum sangat baik, namun terhambat dengan keterbatasan tenaga kerja dan sarana operasional.

Kendala yang dihadapi oleh UPT Operasional penerangan jalan umum dapat dilihat dari fungsi monitoring, (a) Ketaatan pelaksana kegiatan monitoring akan standar operasional prosedur yang belum terlaksana dengan baik, terlebih SOP yang dimiliki belum mencakup segala bidang kegiatan, sehingga ini menimbulkan rendahnya target kerja dari bidang lain. (b) Pemeriksaan atau *auditing* berhubungan dengan kegiatan operasional penerimaan pengaduan, dan operasional teknis lapangan yang terhalang oleh terbatasnya jumlah tenaga teknis dan juga sarana kendaraan operasional yang terbatas. (c) Laporan kegiatan yang juga masih belum sesuai target, dikarenakan pelaksanaan pemantauan turun lapangan terhambat oleh banyaknya surat pengaduan yang masuk tiap harinya. (d) Penjelasan atau *explanation* merupakan gambaran kegiatan yang tidak sesuai dengan target awal, kegiatan pemantauan yang harus dilakukan 1 hari setelah pengaduan tidak dapat dilaksanakan secara langsung.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatannya adalah Tujuan yang jelas, maksudnya adalah dengan dibuat kejelasan prosedur kerja, sehingga sistem pelaksanaan tiap kegiatan ada kejelasan tugas dan waktu tentu, Sasaran atau aspek yang dimonitor, harusnya dengan keterbatasan tenaga kerja, jadwal pemantauan lampu jalan yang sudah masuk masa perawatan diberikan waktu khusus sehingga tidak tumpang tindih kegiatan, Faktor pendukung program seperti data-data lampu jalan dari pihak terkait, yang tersebar tiap daerah di Kota Padang dijadikan acuan untuk perbandingan pembagian tim, Waktu dan jadwal kegiatan monitoring yang masih terikat pada pengaduan masyarakat sudah dilakukannya inovasi seperti kontrol malam dari UPT namun masih belum berjalan dengan terstruktur.

## DAFTAR RUJUKAN

- Data Badan Standarisasi Nasional SNI nomor 7391 tahun 2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung : Alfabeta
- Kawung. "Fungsi Monitoring Kepala Dinas pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara". *Jurnal Online Administrasi Publik UNSRAT* Vol. 3 No. 46.
- Lexy J., Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mercy, Corps. 10 Desember 2018. *Design, Monitoring and Evaluation Guidebook*. (<http://www.mercycorps.org/sites/default/files/file1157150018.pdf>)
- Peraturan Daerah Kota Padang nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Padang.

Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Putra, Hardinas. 2011. "Pelaksanaan Monitoring Kepala Sekolah dalam Kegiatan Pembelajaran SMP Dakwa Rumbah Pekanbaru". UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sondang, P, Siagian. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sule, Tisnawati, Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi 1. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.

Sumando, Asido. "Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum". Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 3 No. 2.

Ulbert, Silalahi. 2003. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Batu Algesindo.

Wrihatnolo, R. 2008. *Monitoring, evaluasi dan pengendalian: Konsep dan Pembahasan*. Surabaya.